

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
---	---	---	---	---	---	---	---	---	----	----	----

2	0	2	3
---	---	---	---



1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	

Media Online	
Media Cetak	Koran Jakarta

RUU DKJ Masukkan Aset-aset Pemprov Jakarta

Hak-hak lain yang selama ini belum diterima oleh Jakarta juga akan didapatkan melalui RUU tersebut.

JAKARTA - Aset-aset milik Pemprov Jakarta saat ini bersama kelengkapannya akan dimasukkan ke dalam RUU Daerah Khusus Jakarta (DKJ). Anggota Dewan Perwakilan Daerah Sylvia Murni mengatakan bahwa RUU DKJ akan memastikan Jakarta tetap punya sumber daya yang mumpuni untuk berkembang meskipun tidak lagi menjadi ibu kota negara.

"Yang jelas, Jakarta jadi atau tidak jadi ibu kota akan tetap punya SDM yang luar biasa kreativitas dan inovasinya, begitu pula fasilitasnya," kata Sylvia di Jakarta, Sabtu. Salah

satu aspek yang akan diatur dalam RUU tersebut adalah hal-hal yang menyangkut aset dan kelengkapan Pemerintah Provinsi Jakarta, yang disebut merupakan bagian tak terpisahkan dari sebuah daerah.

Selain itu, hak-hak lain yang selama ini belum diterima oleh Jakarta juga akan didapatkan melalui RUU tersebut. Sylvia, yang merupakan salah satu anggota tim perumus RUU, mengatakan DPD telah menyusun materi RUU tersebut dan menyerahkannya kepada DPR. RUU tersebut saat ini masih dalam tahap pembahasan dan diusahakan dapat disahkan setelah Pemilu 2024, yang berlangsung Februari, kata dia menambahkan.

Sebelumnya, Penjabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono membentuk tim khusus yang akan menyusun dan menyempurnakan usulan Pemprov DKI Jakarta kepada pemerintah pusat terkait naskah akademik dan RUU DKJ.

Tim khusus tersebut dibentuk sesuai dengan Keputusan Gubernur Nomor 643 Tahun 2023 tentang Tim Penyempurnaan Usulan Rancangan Naskah Akademik dan RUU mengenai Kekhususan Jakarta yang ditandatangani 26 September lalu.

RUU tentang Daerah Khusus Jakarta (DKJ) juga telah dimasukkan sebagai Prolegnas Prioritas 2023 oleh Badan Legislasi DPR pada September. Perumusan RUU DKJ sesuai dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara yang mengamankan perlunya mengganti UU Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintah Provinsi Daerah

Khusus Ibu Kota Jakarta sebagai Ibu Kota Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Kampung Bayam

Dalam bagian lain, Sylvia Murni menilai Penjabat Gu-

bernur DKI Heru Budi Hartono mampu melakukan pendekatan humanis kepada warga eks Kampung Bayam, Jakarta Utara. "Heru Budi Hartono telah menghadirkan suasana kepemimpinan yang humanis. Maka, dalam menyelesaikan kewajiban telah dilakukan dengan baik," kata Sylvia, Minggu (22/10).

Sylvia menuturkan pendekatan ini mampu menggerakkan hati warga terdampak pembangunan Jakarta Internasional Stadium (JIS). Dia menilai Heru mampu membuat warga eks Kampung Bayam secara sadar dan suka rela pindah ke rumah susun yang disediakan.

"Hal ini juga bersamaan pengendalian ekonomi serta perbaikan mutu pendidikan Jakarta yang lebih baik," katanya.

Karena itu, dia mengapresiasi kinerja Heru selama seta-

hun memimpin Jakarta. Maka, Sylvi mendukung perpanjangan masa jabatan Heru.

Menurut dia, banyak torehan prestasi diraih Heru, di antaranya menjalin sinergi antara Pemerintah Provinsi DKI dan Pemerintah Pusat seperti dalam masalah transportasi umum dan sodetan Kali Ciliwung.

"Pekerjaan yang sukses antara lain mengoptimalkan transportasi publik LRT dan MRT hingga penuntasan sodetan Kali Ciliwung guna mengendalikan banjir Jakarta," tuturnya. Selain itu, dia juga menyampaikan dukungan kepada Heru untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan masyarakat melalui reformasi birokrasi, mengatasi stunting, polusi udara dan mendongkrak mutu pendidikan Jakarta.

Kemudian terkait kekompakan pusat dan daerah Sylvi melihat antara lain tampak dalam penanganan polusi udara. Menurutnya, Heru berhasil merajut sinergi lintas sektor. ■ Ant/G-I



ISTIMEWA